

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH



**BNN PROVINSI
JAWA TENGAH**

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini sebagai bentuk implementasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 ini memberikan gambaran terhadap rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun dan bertujuan untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyusunan dokumen ini tentunya masih perlu ada perbaikan untuk menuju kesempurnaan dan menjadi tugas kedepan bagaimana mewujudkan laporan kinerja sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas berdasarkan data dan informasi secara akuntabel serta menjadi wajah secara keseluruhan dari Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dipedomani sebagai acuan peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah



Drs. Heru Pranoto, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Menurut data BPS, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 32.800,70 km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.742.501 jiwa yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 576 Kecamatan dan 8.562 Desa/Kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut perlu dilakukan upaya penanganan narkoba di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada dasarnya, narkoba memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkoba telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Kandungan adiktif di dalam narkoba yang menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, mengakibatkan penyalahgunaan narkoba menjadi problem besar bagi masyarakat bangsa-bangsa. Sifat adiktif dari narkoba yang semula diusahakan untuk ditekan sekecil-kecilnya dalam proses pelayanan kesehatan, dalam kehidupan komersial justru dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengubah nilai pasokan narkoba yang semula bersifat humanistik menjadi pasokan yang bersifat dan bernilai komersial.

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba sudah banyak dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba

dari kalangan remaja dan dewasa, bahkan anak – anak usia SD dan SMP pun banyak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

Di Provinsi Jawa Tengah, prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2019 prevalensi di Jawa Tengah meningkat dari 1.30% atau sekitar 195.081 jiwa menjadi 1.31% atau 196.582 jiwa. Oleh sebab itu butuh penanganan yang ekstra guna mencegah peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah.

Saat ini, telah banyak kampung menjadi jalur masuknya barang terlarang tersebut, terutama kampung-kampung rawan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi diperparah dengan tingkat perekonomian masyarakat yang rendah, tentunya menjadi sasaran yang paling disukai bandar narkoba untuk melancarkan aksi jahatnya.

Kampung-kampung tersebut menjadi wilayah strategis untuk jalur penyelundupan, penyebaran, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah dalam hal ini pihak kelurahan harus dapat menjadi garda terdepan untuk perang terhadap peredaran gelap narkoba. upaya ini harus segera dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk ikut andil dalam memerangi narkoba.

Keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pihak kelurahan dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) tahun 2020-2024.

Inpres tersebut merupakan tenaga baru dalam memerangi narkoba. Untuk itu, komponen masyarakat anti narkoba maupun pemerintah dapat memanfaatkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2020 itu dalam rangka mengoptimalkan kegiatan dan menggelorakan semangat komitmen serta pemahaman anti narkoba di kalangan lingkungan instansi pemerintah dan sumber daya masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sinergitas bersama, berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga agar menjadikan Provinsi Jawa Tengah ini makin terbebas dari kejahatan narkoba.

2. Hasil Evaluasi

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2022 di GOR Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Jawa Barat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya;
- b. Untuk Optimalisasi Program Desa Bersinar dan Kotan, perlu dukungan regulasi, sistem informasi, *blueprint* pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta;
- c. Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi;
- d. Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba;
- e. Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam Penyuluhan, Rehabilitasi, Pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT;
- f. Perlu peralatan SKHPN pendukung tugas bidang pemberantasan di seluruh BNNP antar lain seperti (*mobile Ex-ray (Seaport); Direction Finder (DF); Celebrite* dll).

Maka dari itu untuk anggaran TA 2023 sudah ditambahkan untuk mendukung giat tersebut.

Sementara itu jika dilihat dari sudut pandang per bagian/bidang, Bagian Umum mendapatkan 83,56% anggaran atau sebesar Rp.15.753.908.000,- dengan porsi terbanyak untuk belanja pegawai. Sementara itu Bidang Rehabilitasi memiliki prosentase 3,09% atau Rp. 584.121.000,- untuk pelaksanaan anggaran tahun 2023. Sebanyak Rp.1.826.160.000,- menjadi anggaran Bidang Pemberantasan atau sebesar 9,69% dari keseluruhan anggaran. Terakhir Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan Rp. 689.782.000,- atau 3,66%.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BNN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota	Rp. 941.000.000
2.	Penyelenggara an Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota	Rp. 1.010.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	9 Kabupaten/ Kota	Rp. 1.941.777.000
4.	Penyelenggara an Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2 Kawasan	Rp. 100.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3.5 Indeks	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	102 Orang	Rp.295.458.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	5 Lembaga	Rp. 1.499.537.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	20 Unit	
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3.4 Indeks	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	2 Peta Jaringan	Rp. 235.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	Rp. 1.130.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	Rp. 594.885.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan	2 Berkas Perkara	Rp. 420.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		dan prekursor narkoba	prekursor narkoba yang P-21*)		
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	89 Indeks	Rp. 331.707.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	9 Kabupaten/ Kota	
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	95 Indeks	Rp. 14.047.455.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	9 Kabupaten/ Kota	

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA VOLUME RINCIAN OUTPUT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi [5936]	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i> [5936.QDB.001]	2 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi [3247]	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba [3247.QDE.002]	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa [3247.UBB.001]	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat [3257]	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” Di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba [3257.QDB.001]	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif [3248]	1. Jumlah Kawasan Rawan Di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika [3248.BDD.001]	1 Kelompok Masyarakat
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah [3259]	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat Yang Diberikan Pelatihan [3259.ADG.001]	12 Orang
		Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	Tenaga rehabilitasi yang diberikan peningkatan kompetensi teknis [3259.ADI.001]	25 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat [3260]	1. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota [3260.BAA.002]	45 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) [3260.BAA.004]	100 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		2. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNP	Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A [3260.BAA.005]	5 Orang
			Layanan Pemeriksaan Psikologi Tipe-A [3260.BAA.006]	5 Orang
			Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional [3260.BDB.001]	5 Lembaga
			Fasilitasi Lembaga di BNNK/Kota [3260.BDB.003]	9 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional [3260.QDB.001]	2 Lembaga
7.	Pascarehabilitasi Penyalahguna Dan Atau Pecandu [3256]	Jumlah Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan [3256.BAA.001]	45 Orang
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi [3251]	Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Berhasil Dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika [3251.BKA.002]	4 Laporan
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika [5354]	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal) [5354.BCA.002]	10 Berkas Perkara
		Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti [3258]	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, Dan Kesehatan Tahanan	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal) [3258.BAA.002]	40 Orang
			Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika (Unit Vertikal) [3258.BIA.002]	2 Produk
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika Dan Non Narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU (Unit Vertikal) [3258.BIA.002]	19 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika [5355]	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang P-21*)	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Ditangani BNNP [5355.BCA.002]	2 Berkas Perkara
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN [3238]	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK Di Wilayah Provinsi Dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran [3238.EBD.952]	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi [3238.EBD.953]	1 Dokumen
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan [3236]	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK Di Wilayah Provinsi Dengan Nilai IKPA Mencapai Target	Layanan Manajemen Keuangan [3236.EBD.955]	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran [3236.EBD.994]	12 Layanan